

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Flyover Ciliwung Kalibata adalah infrastruktur jalan yang dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011, lalu proyek ini dilanjutkan dengan membongkar jembatan lama karena sudah digantikan dengan jembatan layang. Pasca pembongkaran inilah dampak stagnasi berupa pembebasan lahan mulai memberikan sumbangannya terhadap deprivasi kapabilitas. Terdapat permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat baik itu mereka yang tinggal dibawah flyover Ciliwung Kalibata, pedagang keliling, hingga pengguna jalan. Permasalahan tersebut terbagi kedalam dua aspek, yakni aspek sosial dan aspek ekonomi.

Meninjau pada segi sosial, bisa dilihat terdapat dinamika dalam peran masyarakat, persepsi masyarakat terhadap objek pembangunan yakni flyover, Perbedaan interaksi, timbulnya stigma, serta dilema pembangunan manusia dalam stagnasi ini, selanjutnya dari segi ekonomi, terjadi permasalahan berupa menurunnya profit bahkan banyaknya usaha ekonomi mikro yang gulung tikar karena usahanya tidak terlihat oleh pembeli semenjak sistem lalu lintas berganti dari jalur bawah, menjadi jalur atas. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama terhadap kualitas pendidikan anak.

Penelitian ini melihat bagaimana fenomena stagnasi infrastruktur flyover Ciliwung Kalibata tersebut dari perspektif pembangunan manusia Amartya Sen.

Seperti kebijakan mainstream lainnya, memang pembangunan flyover Ciliwung Kalibata ini sendiri juga disandarkan pada kepentingan banyak orang, sehingga hal ini cenderung mengorbankan beberapa pihak yang juga memiliki kepentingan lain didalam satu produk kebijakan. Menurut Amartya Sen, didalam ruang lingkup demokrasi, setiap kepentingan haruslah terwakilkan didalam dialektika terkait perumusan kebijakan, karena hal ini bersinggungan dengan kapabilitas setiap individu didalam ruang sosial.

Penelitian ini mencoba membuat jalan keluar pemberdayaan kolaboratif ala Amartya Sen. Daya efektif setiap individu dianalisis dan disinambungkan dengan pertimbangan moral untuk memberdayakannya. Fenomena ini bukanlah tanggung jawab satu pihak seperti pemerintahan saja, melainkan juga setiap insitusi baik formal maupun non-formal yang sudah memiliki daya efektif dan mencapai kapabilitasnya karena menurut Sen, setiap aspek yang sudah memiliki daya efektif diwajibkan untuk ikut serta memberdayakan mereka yang lebih lemah dibanding dirinya. Baik LSM serta anggota masyarakat lain seharusnya membentuk satu pemecahan kolaboratif untuk mereka yang mengalami deprivasi di dalam proyek pembangunan ini.

Terakhir, penelitian ini melihat bagaimana kepentingan laten dari suatu kelompok bisa terjadi karena aspek pendidikan yang tidak mendukung secara sosio-kultural, sehingga tidak terciptanya kelompok manifest sebagai representasi dari sikap resisten terhadap proyek pembangunan itu sendiri, penulis menganalisis bagaimana kondisi sosial dimasyarakat tersebut mampu membentuk satu *epistheme* yang pada

akhirnya mempengaruhi cara berfikir mereka. Penulis juga menganalisis terkait bagaimana peran kekuatan transenden mampu menciptakan satu tindakan yang pada akhirnya tetap membuat mereka menjadi kelompok laten. Minimnya kualitas pendidikan masyarakat pada akhirnya membuat diskusi didalam perencanaan keputusan menjadi buruk serta cenderung parokial.

B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian hingga analisis diatas, maka dapatlah disimpulkan beberapa poin-poin sebagai harapan terhadap fenomena yang terjadi, untuk suatu perubahan yang lebih baik bagi setiap unsur didalam pembangunan, poin-point tersebut adalah :

1. Dilihat dari hasil wawancara dengan pihak struktural maupun masyarakat , maka selayaknya kajian mendalam secara sosiologis terkait bagaimana komitmen atau nilai setiap individu, serta bagaimana keluhan yang dialami individu agar pembangunan pada akhirnya tidak merugikan sebagian pihak, atau setidaknya pembangunan tersebut sudah mempertimbangkan masyarakat untuk mereduksi dampak negatif bagi mereka. Karena aspek sosial sendiri adalah aspek utama yang harus diperhatikan didalam penerapan satu kebijakan, karena pendekatan teknis semata pada akhirnya hanya akan membuat produk pembangunan menjadi timpang dan mengalami disorientasi secara etis.

2. Selayaknya pemerintah memberikan secara rutin sosialisasi terkait kendala yang dialaminya kepada setiap institusi yang memiliki daya efektif dimasyarakat, agar informasi terkait keadaan yang terjadi semakin bisa diakses oleh banyak orang dan pada akhirnya mampu terciptanya model kolaboratif antara beberapa pihak bagi formal maupun non-formal. Pemerintah juga sebaiknya mensosialisasikan orientasi pembangunan kepada anggota masyarakat karena untuk menciptakan satu tindakan komunikatif didalam sistem demokrasi, sehingga perdebatan terkait berbagai kepentingan bisa terjadi secara transparan, disamping itu hal ini juga mencegah prasangka buruk terhadap pihak pemerintahan.
3. Dilihat dari hasil studi ini, memang secara general pendidikan masyarakat masih amatlah rendah, hal ini mampu terlihat dari berbagai tindakan masyarakat dalam memaknai realitasnya. Padahal aspek pendidikan merupakan aspek yang mampu menjadi modal dari beberapa aspek lainnya seperti simbolik, hingga ekonomis. Efektivitas modal pendidikan ini haruslah diperkuat kembali khususnya pada masyarakat sekitar, karena disamping hal ini mampu membuat mereka lebih rasional dalam bertindak, hal ini juga mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan yang demokratis, karena mereka menjadi lebih pandai dalam menyusun argumentasi baik untuk hal resistensi maupun sebaliknya didalam diskusi publik terkait kebijakan apapun. Pendidikan yang meningkat juga akan

menyelesaikan permasalahan lainnya seperti buang sampah sembarangan misalnya, karena mereka mulai menyadari terkait etika lingkungan didalam kehidupan mereka.

4. Harapan terakhir adalah perlunya pemerintah untuk memberikan legitimasi terkait respon masyarakat terhadap stagnasi pembangunan ini seperti parkir umum, tempat bermain, hingga parkir, agar respon tersebut memiliki kejelasannya antara bisa untuk terus dilakukan, atau harus dihentikan dan diganti dengan respon lainnya. Karena hal ini juga membuat relasi antara masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih terkoordinir dan jelas.

